

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut *Asian Disaster Reduction Center* (ADRC), bencana merupakan suatu gangguan serius terhadap masyarakat yang dapat menimbulkan kerugian secara meluas dan dirasakan oleh masyarakat, berbagai material dan lingkungan (alam) dimana dampak yang ditimbulkan melebihi kemampuan manusia dalam mengatasinya dengan sumber daya yang ada (Khambali, 2017). Bencana adalah peristiwa yang mengganggu tatanan masyarakat, yang menyebabkan kerugian ekonomi, sosial maupun nyawa dan juga dapat mengganggu aktifitas sehari-hari, yang berdampak dalam kehidupan masyarakat (Tas et al., 2020).

Berdasarkan data CRED/*Centre for Research on the Epidemiology of Disasters* tahun 2018 Indonesia menempati urutan pertama dari 10 negara dengan jumlah korban tertinggi akibat bencana. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang mempunyai tingkat risiko bencana yang tinggi di dunia. Indonesia menduduki peringkat ketiga untuk negara paling rawan terhadap bencana gempa bumi di dunia menurut UN-ISDR, (Rizky, 2019). Secara geografis Indonesia terletak di dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia, dan terletak diantara dua samudra, yaitu samudra Pasifik dan samudra Hindia. Indonesia berada di jalur gempa teraktif di dunia karena dikelilingi oleh Cincin Api Pasifik dan berada di atas tiga tumbukan lempeng

benua. Pertemuan tiga lempeng aktif, yaitu Indo-Australia di selatan, Eurasia di utara dan Pasifik di timur (Rosidin et al., 2020)

Gempa bumi merupakan ancaman bencana alam yang dapat memberikan dampak terbesar kepada masyarakat di Indonesia, karena datang secara tiba-tiba (*Sudden Onset*) dan dapat berdampak pada wilayah yang luas. Hampir setiap tahunnya, kurang lebih 3 kali gempa berkekuatan 7 SR atau lebih terjadi di Indonesia dan dapat menimbulkan korban jiwa serta kerusakan infrastruktur atau lingkungan (PMI,2016). Berdasarkan data dan informasi bencana Indonesia (DIBI), Indonesia mengalami 240 kali gempa bumi berskala besar dan 14 kali tsunami yang berdampak terhadap 4 juta lebih kehidupan masyarakat dalam renting waktu 15 tahun terakhir (2004-2018) (BNPB, 2019).

Bencana gempa bumi dan tsunami paling besar yang pernah terjadi di Indonesia yaitu bencana yang terjadi di provinsi Aceh. Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) diguncang oleh gempa besar berkekuatan 9,3 SR, disertai dengan tsunami. Kejadian bencana tersebut terjadi pada tanggal 26 Desember 2004, dampaknya mengakibatkan 130 ribu lebih korban jiwa dan 37 ribu orang hilang. Banyaknya korban jiwa disebabkan karna posisi pemukiman warga atau masyarakat Aceh berada di pesisir pantai dan masyarakat tidak mengetahui bahwa setelah gempa dahsyat akan menimbulkan gelombang tsunami. Mereka justru berlarian menuju pantai karena melihat air laut surut dan banyaknya ikan yang muncul dipermukaan (Effendi,2017).

Pasca gempa dan tsunami Aceh 2004, ancaman gempa dan tsunami menjadi perhatian utama segenap stakeholder di Kota Padang. Rentetan kejadian bencana gempa bumi terus terjadi baik dari yang tidak merusak sampai yang merusak. Terdapat 3 provinsi di pulau Sumatera yang pernah mengalami kejadian gempa bumi yang cukup besar dan disertai tsunami dengan kerusakan yang cukup parah (BPBD Sumbar, 2019). Sumber ancaman gempa di Sumatera terdiri dari *Mentawai Megathrust*, *Mentawai Fault System* dan *Sumatera Fault System* (Sesar Sumatera) atau yang disebut juga dengan *The Great Sumatera Fault* (Amri et al., 2018).

Kota Padang terletak di area pesisir sehingga kota Padang memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi yaitu berupa gempa bumi, tsunami, badai, banjir dan banjir bandang, gelombang ekstrim, abrasi pantai, tanah longsor, dan kebakaran (Sudibyakto, 2018). Penyebab Kota Padang merupakan daerah resiko bencana karna kondisi fisik wilayah Kota Padang berada pada pesisir pantai dan dilalui oleh patahan *megathrust* (Sampaguita, 2013). Kota Padang termasuk dalam tingkat kerentanan kategori tinggi terhadap bencana gempa dan tsunami, bahkan provinsi Sumatera Barat termasuk dalam 7 provinsi di Indonesia yang mendapatkan prioritas dalam Kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana gempa bumi dan tsunami (Dian, 2013).

Salah Satu kecamatan di Kota Padang yaitu Kecamatan Koto Tangah yang merupakan daerah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap gempa bumi dan tsunami yang termasuk dalam 5 tertinggi di Kota Padang berdasarkan luas

bahaya tsunami. Hal tersebut disebabkan, karna sebagian besar wilayah di Kecamatan Koto Tangah berada di pesisir pantai. Berdasarkan data dari kementerian dalam negeri RI Direktorat Jendral Bina Pemerintah Desa, Pada Kelurahan Pasie Nan Tigo luas wilayah desa/keluarahan dengan rawan banjir 2.000 Ha, dan 2.512.000 Ha desa/keluarahan dengan rawan Tsunami, dan 2.512.000 Ha desa/keluarahan dengan rawan jalur gempa. Pada saat survey yang dilakukan pada tanggal 6 Desember 2021 di RW 04 kelurahan Pasie Nan Tigo, berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat, masyarakat mengatakan sering terjadi bencana seperti gempa bumi dan air pasang tetapi tidak terlalu berdampak kepada kegiatan sehari-hari masyarakat.

Untuk mengantisipasi kejadian tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dimana terdapat 3 tahap penyelenggaraan bencana yaitu, prabencana, saat tanggap bencana, dan pasca bencana. Pada tahap prabencana dapat dibagi menjadi dua meliputi dalam situasi tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Pada situasi terdapat potensi terjadinya bencana yang harus ditingkatkan adalah kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana. Tahap ini merupakan upaya yang sangat penting bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana sebagai persiapan menghadapi bencana dan dapat meminimalisir dampak dari bencana.(BPBD.2018)

*Disaster preparednes* atau Kesiapsiagaan bencana merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan yang tujuannya untuk mengantisipasi bencana melalui

pengorganisasian dengan langkah tepat guna dan berdaya guna sehingga mampu meminimalisir atau mengurangi dampak dari bencana yang terjadi baik kerusakan lingkungan, ekonomi, sosial, maupun korban jiwa (Rusiyah,2017). Kesiapsiagaan bencana merupakan kondisi dari suatu masyarakat baik secara individu maupun kelompok yang memiliki kemampuan secara fisik dan psikis dalam menghadapi bencana ( Khambali, 2017). Faktor kesiapsiagaan merupakan faktor yang penting dalam menurunkan resiko dan dampak kerugian yang ditimbulkan dari bencana alam, karna kesiapsiagaan ini tidak hanya terfokus untuk kelompok tetapi juga kepada individu masyarakat (Aji, 2015).

Masyarakat merupakan korban sekaligus penanggap pertama pada situasi krisis kesehatan atau bencana di daerahnya, yang dapat mengancam jiwa atau kesehatan mereka. Masyarakat seharusnya dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesiapsiagaannya baik dari segi individu ataupun rumah tangga karna dapat mengurangi dampak dari bencana (Herawati,2017). Sebagai bagian dari masyarakat, kader menjadi garda terdepan dalam kejadian bencana (Kemenkes RI, 2015). Kader merupakan cikal bakal sumber daya dalam mengatasi permasalahan seperti kesehatan, bencana, dan kegawatdaruratan secara mandiri (Sartika, 2017).

Kader kesehatan atau *the community health worker* merupakan anggota masyarakat dimana mereka tinggal dan mengabdikan (bekerja), dipilih oleh masyarakat, serta bertanggungjawabkan kegiatan kepada masyarakat (tempat kegiatan), yang didukung oleh sistem kesehatan tetapi tidak harus

menjadi bagian dari organisasi, dan memiliki pelatihan yang singkat dibandingkan tenaga kesehatan professional (Suprajitno, 2016). Kader Kampung Siaga Bencana (KSB) adalah bagian dari masyarakat dan perpanjangan tangan dari lembaga pemerintahan yang berfungsi untuk mencegah gawat darurat dan bencana meliputi kesiapsiagaan masyarakat, pencegahan dan mitigasi atau penjinakan kejadian gawat darurat dan bencana, serta berfungsi pula untuk reaksi cepat penanganannya di bidang kesehatan (Welly, 2021).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Keith Nicholls tahun 2015 di Amerika Serikat, kader berperan dalam kesiapsiagaan bencana seperti memberikan penyuluhan mengenai bahaya yang ditimbulkan dari bencana, memberikan informasi mengenai langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin keselamatan, kelangsungan hidup masyarakat selama dan setelah keadaan darurat sehingga dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana (Picou & Lowman, 2015). Peran tersebut dapat dilakukan karena adanya modal sosial yang terbangun antara kader dengan masyarakat dimana modal tersebut dapat meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana (Keith, dkk, 2015).

Survey awal yang dilakukan oleh mahasiswa profesi keperawatan bencana belum terdapat kader Kampung Siaga Bencana (KSB) di RW 04 Kelurahan Pasie Nan Tigo yang bergerak khusus dalam bencana maka perlunya dibentuk kader bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana agar dapat meminalisir resiko bencana. Sehingga, Mahasiswa Profesi

Ners Fakultas Keperawatan UNAND yang telah melaksanakan praktek mata kuliah keperawatan bencana di RW 04 Kelurahan Paise Nan Tigo memfasilitasi masyarakat dalam membentuk kelompok kader dengan nama Kader Kampung Siaga Bencana disingkat dengan Kader KSB yang dilantik oleh kelurahan tanggal 31 Desember 2021. Anggota dari kader KSB berasal dari masyarakat RW 04 Kelurahan Paise Nan Tigo yang terdiri dari 8 orang. Kader Kampung Siaga Bencana (KSB) dibagi menjadi 3 agregat yaitu agregat lansia, ibu hamil dan anak, remaja dan dewasa. Semua anggota kader KSB RW 04 Kelurahan Paise Nan Tigo sebelumnya belum pernah menjadi kader. Upaya yang telah dilakukan oleh mahasiswa untuk mempersiapkan kader sebelum menjalankan perannya yaitu memberikan pendidikan kebencanaan melalui penyuluhan, pelatihan dan simulasi dari tanggal 9 – 29 Desember 2021.

Pemberian pendidikan kebencanaan merupakan suatu modal untuk kader dalam melaksanakan perannya sebagai kader. Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan perilaku individu ataupun kelompok serta menjadi salah satu upaya proses pendewasaan melalui pengajaran dan pelatihan (Mohammad dan dkk, 2014) sedangkan pendidikan bencana merupakan proses pembelajaran melalui penyediaan informasi, pengetahuan, dan kewaspadaan terhadap peserta didik guna membentuk kesiapan bencana di level individu dan komunitas. Melalui pendidikan bencana ini, dapat meningkatkan kesiapan kader Kampung Siaga Bencana (KSB) untuk menjalankan perannya terutama dalam

meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat RW 04 Kelurahan Pasie Nan Tigo terhadap Bencana.

Berdasarkan gambaran diatas, kesiapan kader Kampung Siaga Bencana (KSB) dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana perlu digali, mengingat kader merupakan orang yang paling dekat dengan masyarakat dan merupakan role model di masyarakat. Untuk itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Kesiapan Kader Kampung Siaga Bencana (KSB) Bencana dalam meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap bencana gempa dan tsunami di RW 04 Kelurahan Pasie Nan Tigo.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kesiapan kader Kampung Siaga Bencana (KSB) dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana gempa bumi dan tsunami di RW 04 Kelurahan Pasie Nan Tigo.”

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi kesiapan Kader Kampung Siaga Bencana (KSB) dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana gempa bumi dan tsunami di RW 04 Kelurahan Pasie Nan Tigo.

### **D. Manfaat**

1. Bagi Institusi Pendidikan

Penelitian ini dapat menjadi referensi kepustakaan dalam menambah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu keperawatan bencana

2. Bagi Institusi Pelayanan Kesehatan

Penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan masukan mengenai kesiapan kader dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terkait bencana gempa bumi dan tsunami.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan masukan terhadap penelitian selanjutnya mengenai kesiapan kader dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terkait bencana gempa bumi dan tsunami.

